

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ibukota sebuah negara merupakan sebuah objek vital yang menjadi pusat pemerintahan sebuah Negara. Hal ini dikarenakan fungsi dari ibukota adalah sebagai kota / munisipalitas tempat kedudukan pusat unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Sebagai pusat pemerintahan, ibukota juga menjadi daerah dimana hubungan diplomatic antar negara diberlangsungkan, sebagai contoh berbagai kantor kedutaan luar negeri berada dalam ruang lingkup ibukota. Maka dari itulah, Ibukota negara biasanya menjadi sebuah tolak ukur utama bagi negara lain dalam memandang prospek serta nilai dari sebuah negara tersebut. Tetapi, terdapat pula beberapa negara yang membagi ibukota negara mereka sesuai fungsi yang diinginkan, contohnya adalah pada Negara Republik Afrika Selatan yang memiliki 3 ibukota dengan masing masing fungsi yaitu; Pretoria sebagai pusat fungsi eksekutif (pemerintahan), Bloemfontein sebagai pusat fungsi yudisial (kehakiman), dan Cape Town sebagai pusat fungsi legislative. Tidak hanya Afrika Selatan, Israel (Yerusalem dan Tel Aviv) dan Belanda (Amsterdam dan Den Haag) juga memiliki penataan fungsi ibukota yang tidak seperti umumnya yaitu membagi kota administrasi maupun kota hubungan diplomatic yang terpisah.

Peran Ibukota sebagai tolak ukur internasional menjadikan berbagai negara tidak segan dalam menjadikan ibukota negara mereka sebaik mungkin. Perhatian khusus dan dana yang memadai digelontorkan untuk mengontrol permasalahan yang ada di dalam ibukota, maupun menata kota tersebut semenarik mungkin. Jika ibukota memiliki berbagai permasalahan

yang sudah tidak bisa dikontrol, bukan tidak mungkin apabila dilakukannya relokasi ibukota untuk mencari lokasi yang lebih baik lagi. Tentunya hal ini hanya akan dilakukan setelah pemikiran matang dan kajian yang mendalam untuk memutuskan kebijakan tersebut.

Selain dari pihak pemangku kebijakan, isu pemindahan ibukota akan selalu hangat dibicarakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Isu ini menjadi menarik perhatian masyarakat karena pemindahan ibukota negara mengharuskan berbagai instrument pemerintahan pusat untuk dipindahkan ke lokasi baru, baik Sumber Daya Manusia maupun Infrastrukturnya. Sehingga, seperti butterfly effect, dampak pemindahan ibukota akan dirasakan berbagai pihak dengan tingkatan yang berbeda – beda sesuai kedekatan dari objek isu.

Berbicara tentang pemindahan ibukota, banyak sekali negara yang telah melakukan agenda ini sejak dahulu, baik dikarenakan perang / kedudukan negara lain, maupun dikarenakan isu perpolitikan. Indonesia sebenarnya juga pernah melakukan agenda ini pada tahun 1945 – 1950, dimana Jakarta berpindah ke Yogyakarta lalu ke Bukittinggi sebelum kembali ke Jakarta hingga saat ini. Pemindahan ini tentunya dikarenakan isu kedudukan negara lain sehingga dilakukan secara terdesak, tetapi wacana pemindahan ibukota Indonesia secara formal telah dipikirkan semenjak era pemerintahan Presiden Soekarno (1957). Pada tahun tersebut, calon Ibukota Negara (IKN) yang dipilih adalah Palangkaraya di Kalimantan Tengah dengan alasan berada di tengah lokasi Indonesia. Lalu pada tahun 1997, Presiden Soeharto juga mencanangkan pemindahan ibukota ke Jongol, Jawa Barat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 juga pernah membuat tim pemindahan ibukota yang belum ter-realisasikan.

Agenda yang terhenti ini selanjutnya kembali berjalan setelah Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2019 mengeluarkan pengumuman Pemindahan Ibukota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pengumuman ini merupakan hasil dari rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019, yang juga telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana ini ditargetkan mulai pada 2020 sampai 2024 secara bertahap, dimana saat ini RUU yang akan menjadi payung hukum pemindahan ibukota telah masuk tahap legalisasi nasional yang menjadi pembahasan prioritas Dewan Perwakilan Rakyat.

Penentuan lokasi pemindahan ibukota tentunya dengan mempertimbangkan berbagai syarat ibukota negara ideal diantaranya; aspek ketersediaan lahan yang memadai; sisi pertahanan dan keamanan yang baik; lingkungan sehat dan bebas dari bencana; kemudahan aksesibilitas dunia internasional dan arus informasi memadai; ketersediaan sumber daya alam dan manusia, kelayakan infrastruktur, serta kondisi masyarakat yang kondusif dan minim konflik. Berdasarkan rumusan tersebut kemudian dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia untuk menentukan alternatif lokasi sebagai calon ibukota negara.

Rencana pemindahan ibukota ini juga direncanakan dengan perpindahan pegawai pemerintahan (Aparatur Sipil Negara) inti yang juga nantinya dilaksanakan secara bertahap setelah infrastruktur yang akan dibangun di calon IKN telah rampung dan siap digunakan. Perpindahan ini tentunya akan meningkatkan laju migrasi dan akan mempertemukan budaya pendatang dengan budaya masyarakat setempat. Menimbang perbedaan budaya dan beragamnya nilai masyarakat Indonesia, hal ini tidak luput akan kerentanan terjadinya gesekan diantara budaya tersebut. Tidak hanya dari sisi perbedaan budaya saja, permasalahan lain yang muncul sangat tinggi

potensinya untuk berubah menjadi suatu konflik di masyarakat terutama konflik sosial.

Fakta lain dibuktikan dengan berbagai fenomena yang terjadi diakibatkan terjadinya pengelompokan masyarakat yang akan menjadi penduduk asli dan pendatang. Pengelompokan ini rentan sekali mengekskalasi menjadi konflik sosial yang akan pecah jika terjadi kesenjangan didalamnya. Untuk melihat potensi ini, diperlukan berbagai studi kelayakan dan penelitian mendalam yang khusus mengawali pemindahan ibukota ini dengan tolak ukur kepuasan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar dari semua pihak yang akan merasakan langsung pemindahan ibukota ini.

Urgensi penelitian ini adalah sebagai salah satu sarana rujukan untuk mencegah potensi konflik sosial yang akan timbul, serta agar konflik tidak mengekskalasi dan mengganggu keamanan nasional dan ketertiban masyarakat saat terjadinya pemindahan ibukota ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi suatu rekomendasi, bagi pemerintah dan semua pembuat kebijakan, dalam meminimalisir konflik sosial pemindahan Ibukota maupun sebagai sistem peringatan dini.

Melihat perhatian pemerintah maupun masyarakat Indonesia terhadap isu pemindahan ibukota yang cukup besar, tidak bisa kita pungkiri bahwa rencana ini sudah matang. Namun, ada baiknya kita juga melihat potensi – potensi konflik yang akan timbul dan dapat mengganggu kelancaran agenda ini. Selain itu, patut pula menjadi pertanyaan apakah rencana pemindahan ibukota yang dilakukan sudah siap dan selaras dengan unsur pencegahan konflik sosial. Penelitian ini akan mengangkat **Potensi Konflik Sosial dalam Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia** sebagai judul penelitian yang akan dikerjakan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian di atas, Penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana potensi konflik sosial dalam pemindahan ibukota Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana upaya pencegahan eskalasi konflik sosial dalam pemindahan ibukota Negara Republik Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan diatas, penulis merangkai tujuan penelitian menjadi sebagai berikut.

1. Menganalisis potensi konflik sosial dalam agenda pemindahan ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Menganalisis upaya pencegahan eskalasi konflik sosial yang tepat dalam agenda pemindahan ibukota Negara Republik Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguraikan dan menganalisis potensi yang berkemungkinan timbul dari agenda pemindahan ibukota sehingga dapat bermanfaat dikancah akademika. Berikut manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini.

1. Secara metodologis, penelitian ini diharapkan dapat menambah rujukan keilmuan dalam penelitian selanjutnya mengenai Potensi Konflik Sosial dalam Pemindahan Ibukota Negara Indonesia.

2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penelitian ilmu Damai dan Resolusi Konflik maupun ilmu Keamanan Negara.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rujukan bagi pihak terkait Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia, Pemerintah Pusat maupun Daerah, Masyarakat, serta berbagai pihak yang membutuhkan pengetahuan berkenaan dengan penelitian ini, yaitu Analisis Potensi Konflik Sosial dalam Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia. Menambahkan literatur tentang konflik di Papua dan penanganan yang mungkin dilakukan.